

WARGA PEMERINTAH KOLONIAL DI TERNATE

(*Sejarah Perkotaan*)

*Pheres Sunu Widjayengrono**

*Jainul Yusup***

Abstract

Social dualism is historical phenomena in Ternate city society. One of dualism product is gouvernement onderdanen or gouvernement citizen. It diferents with zelfbestuuren onderdanen or sultan citizen. They are in two contradictory positions. Apart of Dutch citizen who will not be discussed in article, government citizen consist of various categories that are christian society, chinas, Makassars, Arabs, and slaves.

Keyword: gouvernement onderdanen, dualism

PENDAHULUAN

Pemahaman atas dualisme pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Belanda yaitu J.H. Boeke yang meninjau tentang aktivitas ekonomi masyarakat antara masyarakat prakapitalisme di sisi pribumi dan kapitalisme pada konteks kolonial. Meskipun demikian konsep ini rupanya tersu melebar kepada berbagai konteks. Dualisme tidak hanya menggambarkan perspektif dan paradigma antara masyarakat Eropa dan kolonial namun berpengaruh secara multidimensional pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai tinjauan atas dualisme itu sendiri muncul baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai karya penelitian berkenaan dengan masyarakat Indonesia di masa kolonial. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kajian perkotaan yang hadir di salah satu ujung timur di wilayah Hindia Belanda yaitu pulau Ternate yang termasuk dalam Kesultanan Ternate dimana pada masa lalu tersohor oleh keberadaan rempah-rempahnya.

Hal menarik dari konsep dualisme dalam artikel ini adalah bagaimana dualisme berpengaruh secara sosiologis dan berpengaruh terhadap morfologi kota Ternate. Meskipun pada mulanya dualisme ini sendiri merupakan suatu ‘insiden’ historis yang berlangsung secara politis dan diaplikasikan dalam wujud pemisahan administratif politik di masa konflik sejak abad ke-16 hingga 18, pada masa damai, dualisme terimplementasikan melalui kebijakan kedua penguasa yaitu pemerintah (kolonial) dan

* Dosen Prodi Sejarah FIB Universitas Khairun Ternate

** Dosen Prodi Sejarah FIB Universitas Khairun Ternate

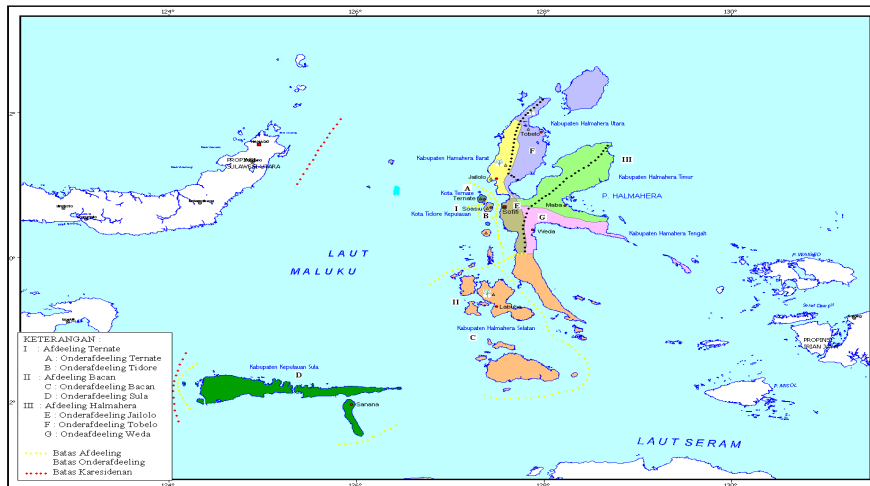
kesultanan Ternate. Peningkatan keamanan di pedesaan dan urbanisasi di wilayah Maluku Utara yang mulai menunjukkan wujud perkotaan menjadikan Ternate seolah-olah terbelah dalam dua kondisi yang berlawanan dimana di satu sisi pembangunan sosial ekonomi bergerak ke arah modernisasi kolonial dalam wujud perkotaan modern dan di sisi lain menunjukkan upaya untuk mempertahankan wujud morfologi dan tata ruang tradisional dalam konteks tradisi patron klien di Maluku Utara.

Dualisme kota Ternate sendiri menciptakan kategorisasi terhadap idiom ketatanegaraan. Istilah *gouvernement gebied* (daerah pemerintah) dan *zelfbestuur gebied* (daerah swapraja/sultan) dan *gouvernement onderdanen* (warganegara pemerintah) dan *zelfbestuur onderdanen* (warganegara swapraja/pemerintah). Artikel ini sendiri lebih terfokus kepada penulisan warganegara sultan (*gouvernement onderdanen*) secara khusus.

Artikel ini sendiri merupakan penelitian awal mengenai sejarah perkotaan di Ternate dan lebih terfokus kepada warganegara pemerintah (*gouvernement onderdanen*). Hal ini tentunya terkait dengan minat bahwa minimnya pengetahuan Ternate secara historis terkait dengan keterbatasan data sejaman sehingga diperlukan upaya komprehensif guna analisa historis. Dengan demikian penelitian ini menjadi langkah awal guna mengungkap studi perkotaan di Ternate khususnya pada periode kolonial.

PULAU TERNATE

Secara geografis pulau Ternate merupakan pulau kedua dari rangkaian 8 pulau di sepanjang pesisir barat pulau besar Halmahera. Dari keenam pulau tersebut, hanya pulau Kayoa yang berada di ujung paling selatan yang bukan merupakan pulau gunung berapi dan berdekatan dengan Kepulauan Guraici dan pulau besar lainnya seperti Kasiruta yang dekat dengan pulau besar Bacan. Secara garis besar ketujuh pulau di sebelah utaranya tergabung dalam rangkaian pulau yang kemudian membangun struktur politik di Maluku Utara yang dikenal sebagai Moluku Kie Raha atau Empat Gunung Maluku. Penyebutan empat pulau itu sendiri mengacu kepada Pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Sedangkan 3 pulau sisanya merupakan pulau minor dan berukuran kecil seperti pulau Hiri yang terletak di ujung paling utara. Bahkan kedua pulau lainnya yaitu pulau Maitara dan Mare merupakan pulau kecil berukuran kurang dari 50 km² dimana pulau Mare merupakan gugusan karang masif yang muncul di atas permukaan laut.



Gb. 1 Peta Maluku Utara. Sumber Pheres Sunu & Jainul Yusup, *Potret Sejarah Maluku Utara: Aktivitas Agraris*.

Rangkaian gunung-gunung tersebut sesungguhnya merupakan puncak gunung api bawah laut yang muncul di atas permukaan laut akibat aktivitas tektonik. Secara geologis kelima gunung terbesar yaitu Hiri, Ternate, Tidore, Moti, dan Makian memiliki dapur magmanya masing. Pulau Tidore yang berada di tengah rangkaian pulau ini merupakan pulau terbesar dengan berbagi dapur magma yang bercabang dengan pulau Maitara. Keempat gunung berapi ini sendiri aktif secara vulkanis. Gunung Ternate dan Makian merupakan gunung berapi paling aktif di antara rangkaian ini. Bahkan Gunung Ternate senantiasa aktif sepanjang tahun bahkan hingga saat ini dengan lebih mencatatkan puluhan letusan besar yang tercatat dalam sejarah dengan erupsi bertipe freato magmatik dengan melontarkan letusan-letusan kecil dan seringkali diiringi lelehan lava baik panas, maupun seringkali dingin.

Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, Gunung Gamalama yang berada di pulau Ternate rupanya memiliki jalur khusus lava ke arah utara. Lelehan lava panas yang mendingin dan membatu kemudian berkumpul ke arah utara dengan membentuk kawasan Batu Angus tepat di bibir pantai sehingga membentuk tebing batu tinggi yang saat ini dijadikan obyek pariwisata. Sedangkan hasil erupsi lava dingin umumnya mengalir melalui sungai-sungai menuju arah timur laut dan utara pulau dengan memuat jutaan kubik pasir gunung api. Hal inilah yang memungkinkan eksistensi tambang pasir di banyak aliran sungai di wilayah utara Ternate guna kebutuhan bahan bangunan. Sungai ini sendiri menunjukkan karakteristik sungai gunung berapi dengan tipe sungai radial sentrifugal yang berarti sungai berasal dari puncak gunung menuju ke dataran lebih rendah. Tentunya jenis sungai ini curam dan bagi pulau semacam Ternate, pulau ini cenderung tidak berair dan jika hujan menyebabkan banjir bandang. Bagi orang Ternate, sungai ini disebut dengan *brangka* yang secara etimologis merupakan serapan dari bahasa Jawa *brangkal* yang berarti jalan air.

WARGANEGARA PEMERINTAH

Pemahaman awal mengenai dualisme secara administratif di Ternate adalah adanya ketidaksengajaan penulis menemui data yang menemukan fakta historis pada abad ke-17 hingga paruh pertama abad ke-20, Pulau Ternate terbagi dalam dua bagian. Dalam terminologi abad ke-20 pembagian dua ini dinyatakan sebagai wilayah *gouvernement* dan wilayah swapraja (*zelfbesturen*). Hal ini kemudian akan meninjau diakronis warga Sultan di Pulau Ternate dan Hiri.

Asal mula dualisme berawal dari pembagian dua di pulau Ternate diperkirakan pasca kematian Sultan Baabullah di tahun 1570. Hal ini menandakan adanya okupasi dari pihak Portugis saat berkonflik dengan kesultanan Ternate. Terlebih pada awal abad ke-17 adanya penggabungan kekuasaan Spanyol dan Portugis sehingga kian memperkuat kedudukan Spanyol-Portugis di Nusantara terutama dalam bidang kemiliteran mengingat kedua kekuatan tersebut sebelumnya saling berkompetisi dan berkonflik.

Fakta historis yang menyebutkan bahwa periode 1606-1663 menunjukkan bahwa sebagian pulau Ternate diduduki oleh bangsa Spanyol, dan bagian lainnya dikuasai oleh bangsa Ternate. Benteng Takome yang berada di Ternate barat laut berada di bawah kekuasaan Ternate dan Belanda, sedangkan ada sebidang tanah tidak bertuan di sebelah selatan Takome berada di antara wilayah Spanyol dan Ternate-Belanda. Pada tahun 1619-1625 benteng Kalamata yang terletak di Ternate tenggara berada di bawah kekuasaan Ternate dan Belanda, dan hingga tahun 1625 warga Ternate masih mendirikan kebun mereka di wilayah tersebut.

Ketika Spanyol memperkuat kedudukannya di Kalamata menyebabkan kebun-kebun di tanah “tak bertuan” milik penduduk Ternate di antara Melayu dan Kalamata harus ditinggalkan oleh penduduk. Pada tahun 1647-1656 Belanda menguasai sebuah benteng batu berukuran kecil yang dinamakan *Caille la Boca* di dataran tinggi dari wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kota Baru. Benteng kecil tersebut dibangun sebagai perlindungan di sisi sebelah selatan benteng Oranje. Benteng kecil disebut berada di dalam kebun yang terletak di antara wilayah kaum *mardjiker* dan *Caille la Boca* di masa itu, dimana kemudian di saat ini menjadi pasar besar di pusat kota hingga sekitar Kota Baru.¹

Ketika Spanyol meninggalkan Gammalamo di tahun 1663, Gubernur VOC menolak penguasa Ternate dan Tidore memasuki bekas benteng Spanyol beserta daerah di sekitarnya. Kedua sultan membuat tuntutan atas wilayah tersebut. Sultan Ternate menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan bekas ibukota lamanya, dan Sultan Tidore mendasarkan tuntutannya atas fakta bahwa ia merupakan sekutu Spanyol. VOC tidak

¹ Fraassen, C.F. 1987. *Ternate, de Molukken en de Indonesische archipel: van soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië*. Proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden..

mengizinkan Sultan Ternate setelah kepergian Spanyol untuk memperoleh kembali benteng Gammalamo karena khawatir jika Ternate memperoleh benteng tersebut akan membangun pemukiman di luar benteng Oranje dan akan mengancam kedudukan pemerintahan VOC. Penolakan okupasi Ternate dan Tidore pada bekas wilayah Spanyol-Portugis menyebabkan wilayah Gammalamo atau yang saat ini disebut Kastela menjadi wilayah VOC.²

Pada mulanya wilayah VOC terdiri dari dua tempat yaitu bagian Malayu dimana bermukim warga perusahaan (dimana benteng Oranje dengan sebagian wilayah di sisi sebelah utara, barat, dan selatan benteng ini), dan benteng Gamlamo yang ditinggalkan oleh Spanyol. Setelah tahun 1663 daerah yang terletak di antara Malayu dan Gamlamo, penduduk Ternate mulai diperkenankan untuk membuat kebun yang pada mulanya terletak di sebelah selatan kota Malayu. Gubernur Padtbrugge semakin memperketat pelarangan setelah pecahnya pemberontakan penduduk Ternate di tahun 1679 pada perang suksesi masa sultan Sibori Amsterdam.³

Oleh karena Belanda melarang kebebasan pendirian pemukiman penduduk Ternate dan pembukaan kebun mereka di Ternate Selatan. Pada saat bersamaan penduduk Ternate menarik diri ke Ternate Utara, sehingga di abad ke-17 terjadi pembagian Ternate di satu sisi menjadi wilayah perusahaan dan sisi lainnya merupakan wilayah VOC, tanpa ditandai adanya batas-batas tegas dari kedua bagian dan pinggirannya.

Pada akhir abad ke-18 ada garis pertahanan Belanda-Ternate dari Kalamata hingga Toloko terhadap Inggris dan Tidore yang menyebabkan batas-batas antara wilayah VOC dan sultan Ternate tidak lagi dihiraukan. Setelah abad ke-19 mulai diberi perhatian secara penuh dan formal mengenai batas-batas antara wilayah *gouvernement* dan sultan (*zelfbesturen*). Batas-batas tersebut terletak dari pemisahan antara kampung Makasar dan kampung Soa Sio di pantai timur hingga Mongi di pantai barat. Dengan demikian wilayah *gouvernement* mencakup sekitar 2/5 bagian dari pulau Ternate, sedangkan wilayah sebelah utara pulau Ternate termasuk Hiri adalah wilayah *zelfbestuur*.

Implikasi Morfologis Dualisme Sosial di Ternate

²Dagregister 1663, 1891: 395-396; Valentijn, François, *Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een naaukeurige en Uitvoerige Verhandeling van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens eene vydluiftige Beschryvinge der Moluccos* (Dordrecht u. Amsterdam 1724-26) 2, 1724: 23.

³Secara militer Belanda masih belum memiliki garnisun yang lebih besar di Takome pada periode tahun 1629-1640 dan mempertimbangkan unjuk mempertahankan benteng di tempat pertama sebagai kepentingan Ternate. Pada akhirnya di tahun 1690-1691 benteng Willemstad di Takome dibongkar. Kemudian di tahun 1656 Belanda meninggalkan benteng Toloko, dimana pada akhir abad ke-18 sekali lagi benteng tersebut digunakan kembali. Valentijn, *op.cit.*, 1724: 13; Fraassen Vol II, *op.cit.*, lihat lampiran IV, pada bagian soa Takome: 253-255; dan pada soa Toloko: 155-156.

Meskipun telah ada pembagian wilayah yang telah diformalisasikan di sepanjang abad ke-19, pada abad ini kaum bangsawan Ternate masih memiliki kekuasaan dalam ukuran tertentu atas pengawasan lahan yang berada di dalam wilayah *gouvernement*. Sebagai contoh adalah fakta bahwa Sultan dapat menghadiahkan sebidang tanah di dalam wilayah *gouvernement* kepada anggota keluarga atau bangsawan. Tanah-tanah ini sangat menguntungkan untuk dijual kepada orang Eropa, Cina, Arab, dan lainnya dimana penjualannya dianggap sah secara hukum oleh *gouvernement*. Kemudian tanah yang diperoleh menjadi hak milik diolah oleh para pemilik dengan bantuan eksploitasi atas tenaga kerja wajib yang merupakan upeti sultan dan bangsawan (*heerendiensten*).⁴

Dalam perjalanannya, di wilayah *gouvernement* juga terjadi arus migrasi di antara penduduk lokal non Ternate, dimana di antaranya sejumlah besar penduduk Tidore serta penduduk Sula dan Makian dalam jumlah lebih sedikit. Pada abad ke- 19 dan 20 banyak penduduk Ternate juga bermukim di wilayah *gouvernement*.⁵ Status istimewa Gamlamo atau Kastela di dalam wilayah *gouvernement*, pada realitanya dimulai sejak tahun 1663 ketika sultan Ternate secara tegas ditolak ijinnya oleh VOC untuk memasukinya, dimana kemudian hal ini berpengaruh hingga abad ke-20. Sisa bagian lainnya dari wilayah *gouvernement* adalah tanah di Kastela ketika masih berupa tanah *gouvernement* dan tanah tersebut tidak termasuk dalam catatan hak milik sipil. Dan ketika wilayah *gouvernement* Ternate Selatan pada umumnya dihuni oleh warga taklukan sultan, terutama penduduk Tidore, Sula, Makian, dan Ternate. Warga *gouvernement* yang bermukim di Kastela berada di bawah Kapita Makassar, dimana ia bertindak untuk mewakili atau atas nama *partada* atau wakil pemerintah yang bermukim di tempat itu.⁶

Pada perubahan administratif di tahun 1915, wilayah *gouvernement* dirubah menjadi distrik *Zuid-Ternate* (Ternate Selatan). Kepala distrik adalah Kapita Makassar, dimana sejak peristiwa itu dan saat kemudian bergelar '*kapitein der Makasaren*' yang mengganti gelar *disticthoofd* (pemimpin distrik). Penduduk Kristen ditempatkan secara khusus dan langsung di bawah pemerintahan *gouvernement*. Di bagian selanjutnya saya telah memperlihatkan bagaimana penggolongan di dalam wilayah *goevernement* dan swapraja memiliki pengaruh hingga tahun 1950an dan 1960an.

Pada masa lalu ada beberapa kategori warganegara *gouvernement*: penduduk Eropa, '*inlandse christenen*' (terj: Kristen Pribumi), Cina, Arab, 'Makasar', dan budak hingga tahun 1860. Pembahasan pertama berkenaan dengan penduduk Eropa. Jumlah penduduk Eropa di Ternate dalam sumber-sumber yang dapat dipercaya hanya disebutkan secara sporadis. Lagipula pemberitaan tidak banyak menyebutkan pemberitaan tersebut,

⁴ De Clercq, *Bijdragen tot de kennis der Residenti Ternate*, Den Haag: J. Brill, 1890, hlm. 23-24; Adatrechtbundel VII, 1913: 204-205;.

⁵ De Clercq, *op.cit.*, hlm. 23-24.

⁶ Adatrechtbundel VII, 1913: 204-205.

oleh karena ada pula disebutkan militer Eropa dari garnisun dan juga yang sama disebutkan seperti di atas.

Sejak abad ke-17 saya hanya mengenal dua pemberitaan yaitu: sebelum tahun 1681 sebanyak 544 pria, 7 wanita dan 3 anak-anak; dan sebelum tahun 1682 sebanyak 396 pria, 6 wanita, dan 5 anak-anak. Pada abad ke-18, saya tidak menemukan adanya pemberitaan. Sebelum abad ke-19 laporan membedakan pada periode 1828-1885 sebanyak 109 jiwa di tahun 1854 hingga 472 jiwa di tahun 1844, dengan rata-rata pencatatan pada 22 laporan terdiri dari 330 jiwa, Pada tahun 1927 ada sekitar 435 penduduk Eropa yang diberitakan bermukim di Ternate, dan pada tahun 1930 adalah 440 jiwa.⁷

Kelompok sosial kedua adalah kelompok Kristen pribumi. Sebelum meletusnya kerusuhan sektarian di tahun 1999, ada sejumlah keluarga kristiani di Ternate yang secara fisik tidak berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya, tetapi pada umumnya masih berbicara dalam pengaruh bahasa Belanda dan pada beberapa keluarga meskipun tidak seluruhnya masih melakukan aktivitas kebudayaan *mestizos* Hindia. Pada tahun 1970an sebagian besar keluarga-keluarga ini masih bertempat tinggal dengan apa yang disebut sebagai *kampung Serani* atau daerah Kristen dan juga terdapat gereja Protestan. Mereka merupakan representasi terakhir dari kategori warganegara *gouvernement* yang muncul pada pengelompokan penduduk di abad ke-19 dengan nama '*inlandse christenen*', atau juga dinyatakan sebagai '*mestizen* (mestizos) dan kulit berwarna lainnya.' Hampir dapat dipastikan kembali ke abad 17, mereka dikenal atas kategori '*mardjikers*', yang mana perubahannya adalah '*orang mardika*' atau orang bebas.

Kaum *mardjiker* Ternate di abad ke-17 dapat dikembalikan pada masyarakat Kristen Ternate abad ke-16. Ketika puncak kekuatan Portugis sedang berkuasa di Ternate masyarakat kristiani yang berada di sekeliling benteng Portugis adalah:

1. Bangsa Portugis itu sendiri.
2. Wanita *mestizos* pribumi yang dinikahi atau hidup bersama dengan bangsa Portugis, dan anak-anak hasil dari hubungan tersebut, yang kemudian secara otomatis menjadi *mestizos*.
3. Penduduk non-Portugis yang berasal dari wilayah Asia lainnya yang dikristenkan oleh misionaris Portugis, dimana dia antaranya terdiri dari serdadu, wanita lansia, dan pegawai rendahan. Sebagian dari penduduk bebas ini terdiri dari mereka yang dikonversi agama Kristen secara sukarela dan budak-budak Portugis yang berasal dari Asia dan telah dimerdekakan dimana mereka tinggal untuk bekerja dalam dinas bangsa Portugis.

⁷Pemberitaan jumlah jiwa di Ternate dan di Maluku Utara, dimana terdapat angka demografis dan perkiraan yang diperkirakan dalam bab ini, dapat ditemukan dalam: Pires, *Suma Oriental* 1944, I: 214, 217; Documenta Malucansia, I, 1974: 678; Frassen I, *op.cit.*, hlm. 34.

4. Beberapa penduduk Ternate yang telah mengkonversi agama Kristen, dimana beberapa di antara mereka merupakan orang-orang terkemuka.
5. Berbagai penduduk yang baru memeluk keyakinan Kristen dari wilayah misionaris seperti Moro, Bacan, Manado, dan Siau. Kaum pemimpin dari wilayah misionaris ini memiliki beberapa pertimbangan politik, militer, kultural, dan agama melalui pembukaan hubungan dengan Portugis. Beberapa anak-anak para pemimpin dari wilayah misionaris yang mengkonversi agama Kristen dididik dalam masyarakat Portugis.

Masyarakat Kristen Mestizos bermukim di sekeliling benteng Portugis di Ternate merupakan suatu keragaman dari keseluruhan wilayah. Kemudian yang harus ditekankan adalah bahwa kaum *mestizos* dan *mardika* Portugis tidak hanya terkait dengan agama yang bersangkutan tetapi juga mencoba untuk mengasimilasi kebudayaan Portugis pada wilayah bahasa dan pakaian. Dalam ukuran yang lebih kecil, hal ini juga disebutkan pada penduduk Ternate yang baru dikonversi dan para pemeluk baru agama Kristen yang berasal dari berbagai wilayah misionaris di sekitar. Pada tahun 1578-1605 terdapat pula masyarakat Kristen di sekeliling benteng Portugis di wilayah Tidore. Tetapi hal ini kurang berkembang daripada masyarakat Kristen Ternate yang dibahas sebelumnya, karena Portugis telah kehilangan pegangan mereka terlebih dahulu pada wilayah misi, dan karena Ternate memiliki hubungan lebih daripada Tidore. Ketika benteng Portugis di Tidore jatuh di tahun 1605, Belanda mengirim pergi masyarakat Portugis yang berjumlah 400 orang menuju Manila.

Dapat dipastikan sebagian kelompok Portugis, *mestizos*, *mardika*, dan *inlandse christenen* dari Tidore pergi menuju Manila di tahun 1605 dan kemudian akan kembali lagi ke Maluku di tahun 1606 bersama dengan Spanyol, sehingga masyarakat Kristen Spanyol di Ternate dari periode 1606-1663 hampir seluruhnya adalah berasal dari masyarakat Maluku. Pada kenyataannya, Spanyol juga membawa serta penduduk *Pampang* atau orang Pampang, yang merupakan masyarakat bebas dari daerah sebelah utara Manila yang telah dibaptis dan berdinasi pada Spanyol sebagai serdadu. Sebagai bagian yang berdinasi pada Spanyol dan menjadi serdadu yang berasal dari Asia, meskipun demikian di dalam sumber-sumber mereka terutama disebut sebagai *mardjiker* Spanyol. Mereka bermukim di wilayah *mardjiker* yang diperkuat Gamlamo. Pada kategori ini secara umum akan mencakup *mestizos*, *inlandse christenen*, dan orang Pampang. Ketika kekuasaan Spanyol ternyata jatuh, Kristen pribumi turut pergi ke Manila bersama kaum *mardjiker*.

Ketika Belanda berkuasa di Maluku, mereka menemukan suatu masyarakat kristiani di Ambon dan Bacan, yang seharusnya mengikuti Portugis. Kristen pribumi bukanlah kaum *mardjiker* dan di bawah VOC tidak ada pengelompokan semacam itu di Ternate. Meskipun ada *mardjiker* di Ternate. Kaum *mardjiker* pertama VOC di Maluku berasal dari kaum *mardika* Portugis, *mestizos*, dan Kristen pribumi atau *mardjiker*

Spainol dimana setelah dijadikan tawanan perang oleh Belanda kemudian beralih dipekerjakan di dalam dinas.⁸

Kemungkinan pula pada *mardjiker* Belanda ada Kristen pribumi dari wilayah Maluku yang termasuk di dalamnya. Kaum *mardjiker* ini sepertinya bermukim di Ternate yang telah melakukan hubungan dan dipengaruhi masyarakat Ternate, meskipun sama seperti semua tetapi ada pula melalui ikatan pernikahan dan pergundikan. Pada bagian lain kaum *mardjiker* Belanda tidak diragukan lagi terdiri dari bekas budak milik perusahaan yang dibawa dari Hindia atau tempat lainnya menuju Maluku. Kemungkinan kaum *mardjiker* lainnya merupakan serdadu sewaan yang berasal dari Asia di Maluku. Selain dari tentara sewaan Jepang yang juga berdinasi di Maluku, kaum *mardjiker* adalah Kristen. Bangsa Cina dan Jepang yang bekerja untuk VOC tidak dicatat sebagai *mardjiker*. Juga banyak kaum *mardjiker* yang berasal dari luar Maluku menjadi *mardjiker* melalui pernikahan dan pergundikan, dan juga berhubungan erat dengan tanah kebun, yang juga telah mempengaruhi dengan cepat terhadap pemukiman mereka di Maluku.

Pada saat waktu bekerja kaum *mardjiker* terhadap VOC telah usai, mereka dapat bertindak sebagai warga perusahaan yang bebas dengan mendirikan usaha melalui pertanian, perikanan atau perdagangan kain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Ternate seluruh kaum *mardjiker* bermukim dengan keluarga di wilayah dengan apa yang disebut daerah *mardjiker*, suatu wilayah yang dibentengi dan terletak persis di sebelah selatan benteng Oranje dan tunduk kepada hukum VOC.

Kaum *mardjiker* menjadi berbagai serdadu Eropa dan pekerja di dinas perusahaan milik orang Eropa, yang umumnya ditempatkan di dalam benteng. Orang Eropa sendiri setelah habis masa dinas mereka tidak akan dikirim pulang kembali, dimana mereka memperoleh status *vrije burger* (warga bebas) bagi mereka sendiri dan keturunannya, juga bagi seluruh keturunannya yang dilahirkan dari pernikahannya dengan wanita pribumi. Kaum *vrije burger* ini umumnya dicatat bekerja sebagai pedagang, tetapi tidak dalam perdagangan rempah-rempah. Secara sosial dan yuridis kaum *vrije burger* dari kaum *mardjiker* seharusnya bersifat majemuk.

Sebagai keturunan Asia di dalam dinas colonial atau sebagai keturunan berbagai *mardjiker* tampak juga *mestizos*, yang lahir dari perkawinan antara bangsa Eropa dengan wanita pribumi. Dengan status bebas mereka, bahasa mereka yang memiliki hubungan dengan Portugis, dan pakaian mereka, kaum *mardjiker* juga tampak berbeda dengan para budak dan Kristen pribumi. Kedudukan *mardjiker* pada VOC dalam banyak sisi memiliki kesamaan dengan kedudukan *kolano ngofangare* atau pekerja sultan di dalam masyarakat

⁸Setelah penyerahan benteng Portugis di Ambon kepada Belanda di tahun 1605 ada 32 atau 33 rumah tangga Portugis tinggal di Ambon di bawah VOC. Kemudian mereka bersumpah setia kepada VOC. Tiele, 1833: 286-287.

Ternate. Hal yang masuk akal bahwa kaum *mardjiker* yang beralih pada sisi Ternate dan menjadi Muslim, tercatat berada di bawah *kolano ngofangare*.⁹

Kelompok penduduk lainnya adalah penduduk Cina. Pada abad ke-16 orang Ternate menyebutkan bahwa Maluku pertama kali dikunjungi oleh kaum pedagang Cina, dan kemudian digantikan oleh orang Jawa.¹⁰ Hal ini tampaknya tidak diberitakan secara mencolok atau kisah kesejarahan ini tampaknya tepat. Jika hal ini benar, sehingga berarti bahwa pelayaran perdagangan Cina tertua di Maluku melintas melalui Filipina sebagai pengganti dari lintasan Indonesia Barat. Dengan demikian jalan perdagangan ini telah ada, dimana mereka harus mendirikan jalur ini untuk keberadaan mereka, karena sejak abad ke-7 orang Cina telah membeli rempah-rempah di pelabuhan Indonesia Barat. Pada abad ke-16 tidak ada yang menyebutkan koloni dagang Cina di Ternate dan juga tidak ada sumber-sumber yang membuat pemberitahuan pelayaran dagang Cina di Maluku. Tetapi hal itu tidak berarti meniadakan peran orang Cina dimana ada beberapa individu Ternate memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Ternate. Kemudian menurut laporan perjalanan Belanda di tahun 1599 orang yang menduduki jabatan *sahbandar* atau 'juru bicara kerajaan' Ternate adalah orang Cina.¹¹

Pada awal abad ke-17, di Manila Spanyol terdapat sejumlah besar koloni Cina, dimana di antaranya terdapat banyak pedagang. Oleh karena mengikuti Spanyol, orang Cina Manila datang ke Ternate, dan juga pada kapal-kapal Jawa dan Melayu ada beberapa orang Cina datang ke Maluku. Pada mulanya Belanda mencoba untuk menarik pedagang Cina ke Maluku karena mereka adalah pembeli potensial bahan makanan dan perbekalan dari VOC. Tetapi VOC segera menarik kembali kebijakan tersebut, karena para pedagang Cina sangat cerdas untuk menarik banyak keuntungan dari VOC. Akan tetapi VOC dengan cepat mengembalikan kebijakannya untuk menarik pedagang Cina di Maluku, dimana pada awal abad ke-17 telah ada beberapa koloni di Maluku yang kemudian menunjuk beberapa pemimpin. Banyak di antara penduduk Cina tetap mempercayai beberapa religi tradisional mereka, tetapi ada beberapa di antaranya yang dengan berupaya mencari hubungan baik dengan Portugis dan Spanyol dan kemudian beralih menjadi Kristen; selain itu ada pula yang berhubungan baik dengan para penguasa Ternate dan Tidore dan kemudian mereka menjadi Muslim. Bahkan ada pula penduduk Cina yang mengabdikan bekerja di kesultanan, dimana terbukti dari fakta bahwa di tahun 1629 Sultan Hamza berbicara dengan *sowohi Cina*-nya, dimana jabatan tersebut berarti 'pemimpin atau penjaga penduduk Cina'.

⁹Pada tahun 1618 diberitahukan bahwa sejumlah *mardjiker* Spanyol melarikan diri menuju Hamza, dimana mereka menjadi muslim dan telah membuat masalah penduduknya. Untuk penjelasan *kolano ngofangare* secara umum. Frassen Vol I, hlm. 483.

¹⁰Th Th. Jacobs, Treatise das Mollucas, 1971: 20, 79.

¹¹ Meilink-Roelofs, 1962: 7, 340 catatan 7.

Kemudian pendirian VOC terhadap penduduk Cina di Maluku bersifat ambivalen. Di satu sisi orang-orang Cina menjalankan perdagangan kain yang sesungguhnya tidak memberi keuntungan terhadap VOC, tetapi VOC terpaksa melakukannya untuk penguasaan ekonomi. Selain itu orang-orang Cina juga mengadakan perdagangan beras antara Ternate dan Mindanao, meskipun hal tersebut pun tidak memberi keuntungan bagi VOC. Di sisi lainnya orang-orang Cina pun merugikan kepentingan VOC melalui berbagai penipuan. Akan tetapi ada politik VOC atas tindakan hukuman para pedagang Cina yang sesungguhnya merugikan kepentingan Perusahaan untuk mengusir serta melindungi dan mendorong perdagangan VOC yang memberi keuntungan. Kelompok penduduk Cina ini memperoleh status hukum yang menyerupai kaum *mardjiker*.¹²

Pada abad ke-18 dan 19 masyarakat Cina di Ternate berjumlah kecil tetapi stabil, dan sangat jarang terdapat orang Cina *totok* atau mereka yang dilahirkan di Cina. Masyarakat Cina memiliki *Kapita Cina* atau kapten warga Cina sebagai masyarakat Cina bermukim dengan terkonsentrasi di *kampung Cina*, daerah Cina yang tepat berada di sebelah selatan benteng Oranje. Daerah ini sebelumnya adalah wilayah kaum *mardjiker*, tetapi seiring dengan waktu para keturunan *mardjiker* tersebut kemudian bermukim lebih ke arah selatan, yang menyusuri pada jalan di belakang benteng Oranje ke arah selatan. Hingga sekitar tahun 1854 iklim perdagangan di Maluku Utara kurang menguntungkan bagi para pedagang Cina. Setelah tahun 185 terdapat kemungkinan lebih besar untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan.¹³ Sumber-sumber menyatakan bahwa perdagangan berada di wilayah Cina pada saat bersamaan pemukiman ini berubah menjadi pertokoan, dimana hal ini tidak hanya terjadi di Ternate, tetapi juga pada kenyataannya di seluruh Maluku Utara.¹⁴

Sejauh yang diketahui bahwa pada paruh kedua abad ke-20 tidak ada lagi penduduk Cina yang menjadi warga Sultan. Tetapi ada beberapa individu Cina yang dinyatakan berada di dalam masyarakat Ternate, sehingga ada beberapa orang Ternate yang memiliki keterkaitan genealogis dengan keturunan Cina.¹⁵ Pada umumnya masyarakat Cina dan Ternate hanya menjaga hubungan mengenai perdagangan belaka. Bahkan masyarakat Cina menyediakan pinjaman pada sultan dan warganya, dan membeli tanah milik pangeran atau dano yang miskin. Setelah tahun 1950 tanah-tanah tersebut disita.

Kategori penduduk selanjutnya adalah kelompok Makassar. Tepat di sebelah utara benteng Oranje terletak kampung Makasar, pemukiman 'Makasar'. Penduduk yang disebut sebagai orang Makasar di masa lalu adalah warga perusahaan atau *gouvernement* yang beragama Islam, dimana bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Melayu

¹² De Clercq, 1890: 36

¹³ Lihat juga bab III: 59.

¹⁴ Tahun 1885 ada 465 orang Cina dimana sekitar 10 hingga 15 orang di antaranya adalah *totok*, de Clercq, 1890: 36.

¹⁵ Fraassen, *op.cit.*, Lampiran IV, pada soa Limatahu.

Maluku. Saya tidak mengetahui dengan pasti asal mula penduduk yang disebut sebagai orang Makasar. Tetapi ada dasar untuk menyebutkan hal itu bahwa pemukiman Makasar di Ternate kira-kira terjadi dengan cara yang sama seperti pemukiman Makasar yang berada di Ambon juga pada abad ke-17 dan 18.

Pendirian kampung Makasar di Ambon telah diketahui secara detail. Rumphius secara khusus menulis bahwa setelah berakhirnya perang Ambon di tahun 1656 tawanan perang Makasar di Ambon disebutkan dalam keadaan bebas dan kemudian mereka diberi pilihan untuk tetap tinggal di Ambon atau kembali ke tanah moyang mereka. Sebagian besar dari mereka, yang memiliki anak dan istri di Ambon, memutuskan untuk tetap tinggal di Ambon dan menyatakan beralih ke agama Kristen. Pada masa itu ada 38 orang Makasar dibaptis dan mereka masuk ke dalam *tractement* kecil dalam dinas VOC. Di dalam dinas itu mereka menggunakan keahlian pertukangan mereka dimana mereka telah mempelajarinya. Masing-masing di antara mereka kemudian bermukim, dimana dari situ berdiri suatu daerah Makasar di dalam kota Ambon.¹⁶

Menurut Valentijn, yang tinggal di Ambon di tahun 1686-1694 dan 1707-1712, orang Makasar dan Bali kebanyakan merupakan budak yang diberikan dan diperjualbelikan secara bebas, yang lama kelamaan menjadi 'masyarakat merdeka yang kecil' yang menjalankan usaha perdagangan kecil dengan kapal-kapal berukuran kecil. Kemudian mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berkebun, menangkap ikan, melakukan kegiatan pertukangan, dan bekerja sebagai kelasi pada kapal dagang. Juga ada di antara mereka yang menjadi budak pemotong dan penjual kayu bakar. Orang-orang Makasar ini bertempat tinggal di jalan Makasar.¹⁷

Kemudian pada periode Valentijn tidak lagi berdinasi di dalam VOC, dan barangkali mereka juga tidak beragama Kristen. Juga di masa Valentijn tidak seluruh orang Makasar merupakan orang merdeka. Pada pencatatan jumlah penduduk di tahun 1708, Valentijn menyebutkan masyarakat Eropa, mestizos, orang hitam merdeka (*mardjiker*), orang Makasar merdeka (152 pria, 229 wanita, dan 155 anak-anak), Ambon, budak Makasar (918 pria, 525 wanita, dan 165 anak-anak), dan berbagai budak lainnya. Jumlah budak Makasar jauh lebih besar daripada jumlah orang Makasar merdeka. Kemudian kita juga menemukan data statistik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sebagai contoh di tahun 1673 jumlah orang Makasar merdeka di Ambon terdiri dari 52 pria, 54 wanita, dan 29 anak-anak. Jumlah budak Makasar dan Buton terdiri dari 1309 pria, 1053 wanita, dan 281 anak-anak.

Asal mula orang Makasar di Ternate barangkali harus meninjau kepada perang Makasar yang berlangsung pada tahun 1667-1669, dimana Speelman dalam persekutuannya dengan Aru Palaka dari Bone dan sultan Mandar Syah dari Ternate mengalahkan kekuatan kerajaan Makasar. Pada awal peperangan ini di bulan Januari

¹⁶Rumphius, 1910, I: 100.

¹⁷Valentijn, *op.cit.*, hlm. 125, 269.

1667 Speelman membawa 5500 orang Makasar sebagai tawanan perang di Buton. Speelman pergi untuk berada di Ternate dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada mereka, dimana ia tidak mungkin untuk membawa mereka semua ke Ternate sebagai tawanan perang. Diputuskan pada saat itu hanya membawa serta 400 pria dan wanita yang dipilih bersamanya untuk dijual sebagai budak di Maluku. Sisa dari tawanan perang tersebut ditinggalkan pada sebuah pulau kecil dekat Buton, yang pada akhirnya terjadi kekurangan makanan atas mereka. Kemudian 400 tawanan perang Makasar muncul sebagai budak di Ternate pada 1667.¹⁸

Pada tahun 1667-1669 dengan pengecualian di Buton juga ada sejumlah besar tawanan perang Makasar yang jatuh di tangan Belanda dan sekutunya. Ada suatu fakta bahwa Makasar (kerajaan) dalam kontrak Bungaya diharuskan menyerahkan kepada VOC 1000 budak pria dan perempuan, atau sejumlah emas dan perak senilai itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebagai akibat berakhirnya perang maka kerajaan Makasar harus menanggung beban berat dan sebagai akibatnya akan menyediakan sejumlah besar budak Makasar di pasar Indonesia. Sebagian tawanan perang dan budak Makasar rupa-rupanya dipastikan telah muncul di Ambon, dimana di tahun 1708 jumlah budak Makasar masih jauh lebih besar dibandingkan orang Makasar merdeka sebagaimana yang telah kita lihat. Sejumlah budak dan tawanan perang Makasar dapat dipastikan juga hadir di Ternate dan kecil kemungkinannya bagi mereka kembali ke tanah moyangnya. Menurut Naidah, penduduk yang disebut orang Makasar sebagai tawanan perang Ternate tiba dari pelayaran ekspedisi di Sulawesi Selatan, dimana yang tertangkap diserahkan kepada VOC.¹⁹ Hal ini dapat juga memungkinkan, tetapi tidak seperti itu. Hal yang lebih dapat diterima adalah orang Makasar Ternate tiba sebagai tawanan perang dan budak Makasar, dimana mereka dibawa secara paksa menuju Ternate dan dalam waktu tersebut ada beberapa di antara mereka yang memperoleh kemerdekaan. Hal yang sangat memungkinkan adalah bahwa penduduk kampung Makasar dari awal mulanya telah terdapat orang Makasar yang merdeka, sedangkan tidak bagi orang Makasar Muslim yang merupakan warga VOC, yang telah tiba di Ternate dan pindah bermukim di tempat itu. Pada paruh kedua abad ke-17 VOC memiliki pasukan bantuan Makasar dan Bugis dalam dinasnya, dan juga di Batavia. Dan dalam *Daghregister* (catatan harian) tahun 1665 menyebutkan bahwa ada 120 pria sebagai pasukan bantuan orang Bugis di Ternate.²⁰

Apapun kisah tentang awal mula kampung Makasar, pemberitaan pertama tentang orang Makasar di Ternate yang saya ketahui tercatat dari tahun 1681. Pada saat itu ada sekitar 70 orang Makasar yang bermukim di Ternate, dimana darinya ada 32 pria. Mereka bukanlah budak karena adanya kemunculan kategori Makasar dalam pernyataan ini pada suatu kategori budak. Masyarakat Makasar ini sudah tentu merdeka juga tidak berada dalam dinas yang digaji VOC, karena di tahun 1688 telah ada pemberitaan nelayan

¹⁸ Valentijn, *op.cit.*, hlm. 342.

¹⁹ Naidah, 1878: 400, 418.

²⁰ *Daghregister* 1665, 1894: 15.

Makasar di Ternate, yang merupakan warga VOC. Pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-18 pada kenyataannya orang Makasar di Ternate merupakan muslim-*mardjiker*, meskipun tidak disebut sebagai *mardjiker* oleh karena keterkaitan mereka dengan agama Islam dan asal usul mereka dari Sulawesi Selatan. Mengingat latar belakang agama mereka sudah sewajarnya mereka tidak dapat melakukan hubungan pernikahan dengan kaum *mardjiker* ataupun *mestizos*. Masyarakat Makasar-Ternate dikelompokkan sebagai warga perusahaan yang beragama Islam, yang bermukim bersama-sama di suatu wilayah, dimana melakukan perkejaan menurut cara mereka sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana dituliskan oleh Valentijn tentang orang Makasar di Ambon, yang pada masa-masa sulit akan turut dipersenjatai dan yang bertugas dalam dinas milisi *burger* (warganegara) bersama kaum *mardjiker*. Kemudian pada tahun 1726 didistribusikan senapan kepada orang Makasar dan kaum *Mardjiker*, karena Ternate terancam oileh pemberontakan orang Tidore. Pada abad ke-19 orang Makasar berdinasi pada bidang pertahanan. Pemimpin masyarakat Makasar, yang diangkat oleh perusahaan dan kemudian oleh *gouvernement*, hingga tahun 1915 menyandang gelar *kapita Makasar* atau ‘kaptan Makasar’. Gelar ini membawanya pada tingkatan sebagai salah satu komandan pertahanan perusahaan. *Jurutulis Malayu* atau ‘penulis Melayu’ yang bekerja di kantorresiden, pada abad ke 19 menjadi milik keturunan *Kapita Makasar*. Hal ini kemudian menyebabkan bahwa *kapita Makasar* bertindak sekaligus sebagai *juritulis Malayu*.²¹

Seluruh warga VOC yang beragama Islam “dicatat sebagai orang Makasar”, setidaknya berada di bawah pimpinan *kapita Makasar*. Biasanya keturunan dari kampung Makasar mengenakan nama keluarga Can, dan dapat dipastikan kembali pada seorang penulis Tidore dengan nama Can, dimana pada sekitar tahun 1731 pindah dari Tidore menuju wilayah kompeni di Ternate dan memperoleh izin untuk bermukim di kampung Makasar.

Penduduk Tidore atau Bacan pindah menuju daerah kompeni atau *gouvernement* untuk meminta perlindungan dari Belanda. Juga berbagai penduduk Indonesia yang beragama Islam lainnya seperti masyarakat Jawa atau Melayu yang bermukim di daerah taklukan kompeni atau *gouvernement* di Ternate, dan juga muslim Cina, yang secara statistic dikategorikan sebagai orang Arab tetapi secara sosial dicatat pada orang Makasar. Peristiwa dengan masyarakat Buton yang berasal dari warga *gouvernement* untuk bermukim di Kastela. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk kampung Makasar. Hal yang membuat jumlah masyarakat kategori Makasar lebih besar lagi adalah pada awal abad ke-20 bahwa para kuli (*koelies*), pekerja kasar yang tidak berkeahlian, tanpa lahan kebun yang berasal dari keturunan budak. Mereka juga secara administrative

²¹ Tobias, 1980: 76; Fraassen, *op.cit.*, hlm. 465.

di bawah pimpinan *kapita Makasar*, meskipun secara sosial mereka tidak diakui sebagai bagian dari kategori orang Makasar.²²

Kampung Makasar telah dan memiliki beberapa masjid, tetapi sultan Ternate memiliki pengaruh atas hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan di kampung ini, juga dengan jabatan hakim atau *hakim syara kampung Makasar*. Dari abad ke-18 saya tidak mengetahui jumlah jiwa orang Makasar. Sejak tahun 1829 hingga 1854 hanya disebutkan beberapa orang Islam yang merupakan warga *gouvernement*, dan beberapa orang Islam warga *gouvernement* ditambah orang Makasar.

Kelompok selanjutnya adalah masyarakat Arab. Dalam sumber dari masa VOC tidak terdapat pemberitaan orang Arab di Ternate. Pemberitaan pertama mengenai orang Arab di Ternate tercatat dari abad ke-19. Dari sumber tertulis dan dari informasi yang diperoleh di Ternate membuktikan bahwa orang Arab menjalankan usaha perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga memiliki kebun kelapa di Ternate dan mengeksploitas sumber ekonomi lainnya. Mereka memperoleh lahan milik melalui pembelian. Orang Arab memperoleh penghormatan dari sebagian besar orang Ternate karena alasan keagamaan. Sebagian penduduk Arab menjadi guru agama. Di masa lalu diundang beberapa orang dengan pengakuan kebangsawanan Arab dan beberapa di antara mereka mengikuti gelar Said atau Sayid, yang berarti keturunan nabi, dimana memiliki pengaruh yang besar pada istana Ternate. Dapat disebutkan nama Said Mukhsin Albar bin Mohamad Albar yang merupakan *guru* atau guru agama sultan Usman dan di tahun 1905 ia diangkat menjadi *imam jiko*.²³

Pada awal abad ke-20, orang Arab pada umumnya tidak termasuk pada kaum ortodoks modern dan bukan pengikut Muhammadiyah. Dalam perjalanan waktu orang Arab menikah dengan wanita lokal, dimana kaum wanita dari keturunan terkemuka. Tetapi orang Arab kurang lebih membentuk masyarakat yang tertutup, karena mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan penduduk yang tidak keturunan Arab. Salah satu bagian penting dari masyarakat Arab di Ternate bermukim secara berkelompok di Fala Jawa, di belakang dan sekeliling *kadaton* Tidore di Ternate. Banyak kebiasaan dan tradisi mereka, seperti seremonial pernikahan, diadaptasikan oleh orang Ternate dan Makasar.

Perbedaan sosial dengan orang Makasar muncul dari adanya fakta bahwa orang Arab pada sekitar tahun 1905 memperoleh sebuah masjid secara khusus, dimana dilakukan doa bagi hari pembebasan setelah pengasingan sultan Usman sejak sekitar tahun 1923. Di tahun 1937, orang Arab juga memiliki seorang pemimpin masyarakatnya, yang bergelar *luitenant Arab* atau Letnan Arab.²⁴ Hal ini berarti bahwa orang Arab di tahun tersebut tidak berada lebih tinggi daripada *kapitein Makasar*. Pada abad ke-19

²²Adatrechtbundel VII, 1913: 195.

²³Frassen, Vol II *op.cit.*, pada soa Jiko.

²⁴Frassen, Vol I, *op.cit.*, hlm. 46.

laporan statistic orang Arab tercatat lebih rendah daripada orang Makasar. Di tahun 1854 ada 112 orang Arab yang bermukim di Ternate dan tahun 1905 ada sejumlah 286 jiwa. Pemberitaan untuk tahun-tahun lainnya tidak ditemukan.

Kelompok terakhir adalah budak. Hingga tahun 1860, masyarakat Eropa dan warga *gouvernement* lainnya dapat memiliki budak, tetapi sedikit diketahui mengenai perbudakan di wilayah *gouvernement*. Sumber-sumber yang ada sangat jarang menyebutkan hal itu. Pada abad ke-19 perbudakan secara berangsur-angsur dihapuskan. Pada tahun 1838 diputuskan melalui residen bahwa orang Tidore di Irian Jaya tidak dapat melakukan pelayaran ekspedisi untuk perbudakan (*slavenjacht*) dan mereka tidak lagi diperkenankan memperjualbelikan budak-budak Papua. Kebijakan ini menandakan bahwa tidak ada lagi orang bebas yang dapat dijadikan budak. Mulai tanggal 1 Januari 1860 perbudakan dihapuskan di wilayah *gouvernement* dan budak-budak dinyatakan bebas sebagai warga *gouvernement*. Menyusul pula pada tahun 1878 di Kesultanan Bacan, dan pada tahun 1879 di Kesultanan Ternate dan Tidore (dengan pengecualian Irian Jaya), dimana perbudakan dihapuskan, sehingga budak-budak harus dimerdekakan.

Pada tahun 1982 ada sejumlah 455 budak di bawah yuridiksi VOC, dimana dia antaranya terdapat 261 pria, serta 194 wanita dan anak-anak. Sejumlah budak di antaranya tentu adalah budak Makasar. Pada abad ke-18 saya tidak mengetahui angka-angka secara pasti. Pada abad ke-19 kita mengetahui adanya 24 pemberitaan pada periode sekitar tahun 1829-1859 dan dari situ terbukti bahwa jumlah budak dalam periode tersebut senantiasa menurun, dari 1044 jiwa di tahun 1829 menjadi 230 jiwa di tahun 1859. Catatan rata-rata dari jumlah budak dari periode ini berjumlah 489 jiwa.

Suatu kategori khusus dalam pemberitaan statistic pada tahun 1840-1852 adalah orang Papua, yang secara hukum tidak sebagai budak, tetapi yang diperkirakan dan diperlakukan hampir menyerupai budak. Masyarakat Eropa dan Cina berupaya untuk memperoleh pelayan, karena membeli sejumlah budak dan orang Ternate tidak ingin mempekerjakan mereka. Aktivitas pembelian dengan mendatangkan dari orang Tidore di Papua. Hal ini tentunya menyatakan bahwa: meskipun pelayaran ekspedisi pencarian budak (*slavenjacht*) secara formal dihapuskan di tahun 1838, mereka memperolehnya dari penduduk Irian Jaya dan kemudian memperoleh budak yang dianggap tidak sebagai budak tetapi sebagai orang Papua. Setelah tahun 1846 *slavenjacht* di Irian Jaya ini pada akhirnya diakhiri.²⁵ Jumlah penduduk Papua pada periode 1840-1852 cukup stabil. Jumlahnya bervariasi dari 433 jiwa di tahun 1847 hingga 219 jiwa di tahun 1852. Perhitungan rata-rata tersebut dari 13 sumber pemberitaan adalah 309 jiwa. Tetapi seperti telah disebutkan bahwa orang Papua ini adalah budak, kemudian perhitungan rata-rata jumlah budak-budak tersebut pada periode 1829-1859 sekitar 657 jiwa.

Mengenai budak dan perbudakan di kesultanan Maluku sumber-sumber tidak menemukan banyak data daripada budak-budak di wilayah VOC atau *gouvernement*. Di

²⁵Bleeker, 1856: 195.

kesultanan sendiri perbudakan memiliki kepentingan dan peran sosial ekonomi yang lebih besar daripada di wilayah VOC atau *gouvernement*. Sebagaimana disebutkan mengenai perbudakan di kesultanan Ternate, dimana kemudian dibuat perbedaan dalam berbagai kategori budak. Pertama-tama harus dibuat perbedaan antara budak yang diketahui secara literer atau umum dan budak hak milik (*echte slaven*); dan di dalam kategori *echte slaven* (budak hak milik) harus dibedakan antara budak istana (*hof slaven*) dan budak dalam hak milik pribadi (*prive-bezit slaven*). Di Ternate, budak sebagaimana yang dikenal secara umum disebut sebagai *ngofangare*. Kata Ternate untuk *ngofangare* berhubungan dengan kata Melayu *hamba* dan *ngofangare* dapat diterjemahkan ke arah paling mendekati dengan ‘pelayan’. Sebaliknya kata Ternate untuk budak adalah *falalom*. Budak istana (*hofslaven*) disebut sebagai *falalom soa Ngongare*, dan budak milik pribadi (*prive-bezit slaven*) menjadi *falalom* tanpa penambahan istilah lagi.²⁶ Kemudian kategori ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Budak yang dikenal secara umum atau *ngofangare*
-
- *Echte slaven*

Dalam masyarakat tradisional Ternate hubungan dengan sultan dengan warganya ditunjukkan dengan adanya seorang pemimpin pada pelayanannya. Para anggota warga diberi perintah dari atas untuk menjalankan berbagai pelayanannya. Dengan demikian mereka menjadi budak sebagaimana yang diketahui secara umum. Kemudian di dalam suatu laporan pelayaran Belanda tahun 1601 menunjukkan bahwa di Maluku para penguasa sangat dihormati oleh rakyatnya, dimana seluruhnya menyebut sebagai budak para raja. Suatu contoh lain semacam itu dari penunjukkan bawahan sebagai budak dalam arti kiasan tercatat dari tahun 1707. Sultan Ternate tidak menginginkan dalam tahun tersebut untuk minum-minum bersama penguasa Gorontalo dan Limboto, karena menurutnya kedua penguasa itu juga dianggap sebagai budaknya. Dari sisi kedua penguasa tersebut, mereka bukanlah warga dari sultan Ternate. Dalam banyak peristiwa tidak begitu jelas apakah termasuk sebagai *echte slaven* atau budak yang diketahui secara umum ketika membicarakan persoalan budak. Kemudian sebagai contoh di tahun 1652 disebutkan bahwa penduduk Pulau Meau sebagian besar adalah budak Sultan Mandar Syah. Saya meyakini bahwa hal ini berarti budak yang dikenal secara umum, tetapi pada titik ini tidak ada suatu kepastian absolut. Suatu peristiwa lainnya adalah sebagai berikut. Penduduk Koloncucu adalah masyarakat Buton yang pindah ke Ternate di tahun 1669

²⁶Masih belum diketahui secara pasti kata *falalom* saat ini yang diganti oleh gambaran eufemisme *ngofa toma fala ma-daha*, yang berarti: ‘anak rumah’. Pergantian ini digunakan sebagai contoh disebutkan pada keturunan budak dari orang tertentu. Fraassen, Vol I, *op.cit.*, hlm. 56.

atau 1670, yang meminta permohonan untuk bermukim di bawah perlindungan VOC. Penduduk Koncucu mempermasalahkan bahwa mereka ditempatkan sebagai budak dan keberadaan mereka kemudian dibagikan pada para bobato dan bangsawan lainnya. Pada saat itu VOC menghentikan hal ini dan pada akhirnya penduduk Koloncucu dijadikan sebagai bagian penduduk biasa Ternate. Contoh terakhir ini menunjukkan bahwa *spreekwoordelijke slaven* atau budak yang dikenal secara umum pada dalam kondisi tertentu dapat menjadi terdegradasi menjadi *echte slaven*. Bagi orang luar perbedaan antara *spreekwoordelijke slaven* atau *ngofangare* dan *echte slaven* atau *falalom* tidak terlalu jelas. Barangkali hal inilah yang menjadi alasan bahwa Portugis di sekitar tahun 1544 menulis bahwa penduduk Ternate menyebut budak mereka dengan *ngofangare*. Tetapi perbedaan krusial adalah bahwa *echte slaaf* atau *falalom* dapat diperjualbelikan, sebaliknya *spreekwoordelijke slaaf* atau *ngofangare* tidak dapat diperjualbelikan. Di sisi lain, pada umumnya makna *ngofangare* berbeda dari pengelompokan *soa Ngofangare*.²⁷

Kesimpulan

Warganegara pemerintah (*gouvernement onderdanen*) merupakan fenomena historis yang muncul dari dinamika historis. Pembahasan di atas sesungguhnya masih terfokus pada satu kelompok sosial saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan data dan keterbatasan ruang dalam artikel ini sendiri. Hal ini tentunya akan dijelaskan dalam penelitian berikutnya guna melihat struktur holistik atas morfologi dan demografi sosial masyarakat perkotaan di Ternate pada masa kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adatrechtbundel XVII. 1919. *Celebes*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- ANRI. 1980. *Ternate: Memorie van Overgave J.H. Tobias (1857); Memorie van Overgave C. Bosscher (1859)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Bleeker, P. "Ichthyologische fauna van Ternate" dalam *Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie Deel X*, Batavia: Lange & Co.
- De Clercq, *Bijdragen tot de kennis der Residenti Ternate*, Batavia: J. Brill, 1890.
- Daghregister 1663, 1665, 1891
- Jacobs, Hubert. 1974. *Documenta Malucansia, I, Edited and Translated*. Rome: Jesuit Historical Institute.

²⁷Treatise, 1971: 163; Fraassen, Vol I. *op.cit.*, hlm: 249-257; 391-397.

- Fraassen, C.F. 1987. *Ternate, de Molukken en de Indonesische archipel: van soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië. Vol I en Vol II*. Proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden.
- Meilink-Roelofs. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1650*. The Hague: Martnus Nijhoff.
- Crab, P van der. 1878. "Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen Tekst Beschreven door den Ternataan Naidah met Vertaling en Aanteekeningen". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Pires, Tomi. *Suma Oriental*. London: Haklyut Society.
- Rumphius, "Ambonsche Historie VII Deel 2" dalam BKI Vol 4 (1910).
- Valentijn, François, *Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een naaukeurige en Uitvoerige Verhandeling van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens eene vydluftige Beschryvinge der Moluccos* Dordrecht u. Amsterdam, 1724-26.